

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
BELANJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Kabupaten/Kota di Sumatera)**



Nama : Leditha Utami

Nomor Mahasiswa : 03.312.259

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2007

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
BELANJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Kabupaten/Kota di Sumatera)**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII**

Oleh :

Nama : Leditha Utami

Nomor Mahasiswa : 03.312.259

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIATISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi/hukuman apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, Mei 2007

Penyusun,

(Leditha Utami)

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
BELANJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Kabupaten /Kota di Sumatera)**



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal : 15 Mei 2007

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Arifin'.

(Drs. Johan Arifin, M. Si.)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

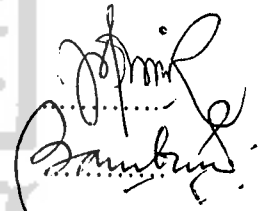
Pengaruh dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Sumatera)

Disusun Oleh: LEDITHA UTAMI
Nomor mahasiswa: 03312259

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 18 Juni 2007

Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Johan Arifin, M.Si

Penguji : Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Sebagai umat yang beragama, dan insan yang senantiasa mensyukuri nikmat, saya menadahkan tangan, menundukkan kepala, seraya berdoa mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, kehadiran *Ilahi Robbi* serta Salawat dan Salam kepada Baginda Nabi junjungan alam Muhammad SAW beserta para sahabat. Atas kehendak dan hidayah-Nya jualah akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten /Kota Di Sumatera)“. Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Kesempatan belajar yang telah saya hingga sampai kejenjang studi ini, tiada lain adalah berkat jasa, dorongan, bantuan dari berbagai pihak, antara lain :

1. Bapak Drs. Asma'i Ishak, M.Bus.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu. Erna Hidayah, M.Si, Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Johan Arifin, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan banyak arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Prapti Antarwiyati, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen FE UII yang telah memberikan bekal ilmu kepada saya selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Papa, Mama dan adikku tercinta yang selalu menjadi motivasi, kekuatan, insprisasi terindah dalam hidup dan cahaya disetiap jalan gelap kehidupanku. Terima kasih atas semuanya karena berkat doa dan kesabaran semuanya saya dapat menyelesaikan studi ini.
7. Atok, Nenek, Tete, Oom, Rafki, Cik En, Cik Di, Faisal, Alm Fadil, Fikri, Cik In, Tante Erna dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
8. My dear Arif, terima kasih atas doa, dukungan, kesabaran, dan perhatiaannya. Maaf sudah banyak merepotkan. Teruslah menjadi penyemangat hidupku.
9. Sahabat-sahabatku tersayang Novi, Tami dan Naini, terima kasih atas semua moment terbaik dan terindah bersama kalian dalam hidupku ya. Aku sayang banget ama kalian. Semangat Galzzz!!!
10. Teman-teman seperjuangan Dewi, Hendy, Wisnu, Danang, Ian, Diana, Zoel dan semua teman-teman KOMISI. Terima kasih atas ilmu, pengalaman berharga, doa dan dukungannya selama ini ya.

11. Winda dan Hasri terima kasih banget ya atas semua bantuan dan bimbingannya. Mulai dari kompre sampai penyelesaian skripsi ini. Kalian memiliki andil besar dalam sebagian proses panjang studiku.
12. Erna, Anggi, Eka, Devon, Agung, Indra, Titis, Lupi, semua teman teman di kos swallow, teman-teman kelas D angkatan 2003 terima kasih atas semangat dan doanya.
13. Mereka yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu tetapi telah banyak memberikan bantuan yang sangat berarti bagi saya.

Tak ada yang dapat saya sampaikan selain mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Saya menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan dan kemampuan yang saya miliki, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Wabillahitaufik walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Penulis

(Leditha Utami)

MOTTO

“Kemarin adalah mimpi yang telah pergi

Esok adalah angan indah yang hendak diraih

Tapi hari ini adalah realita yang harus di jalani”

Kami jelaskan yang demikian itu agar kamu tidak terlalu berduka cita atas apa-

apa yang luput dari kamu, dan tidak juga terlalu gembira atas apa-apa yang

diberikan-Nya kepadamu (QS. Al-Hadid (57) : 23)

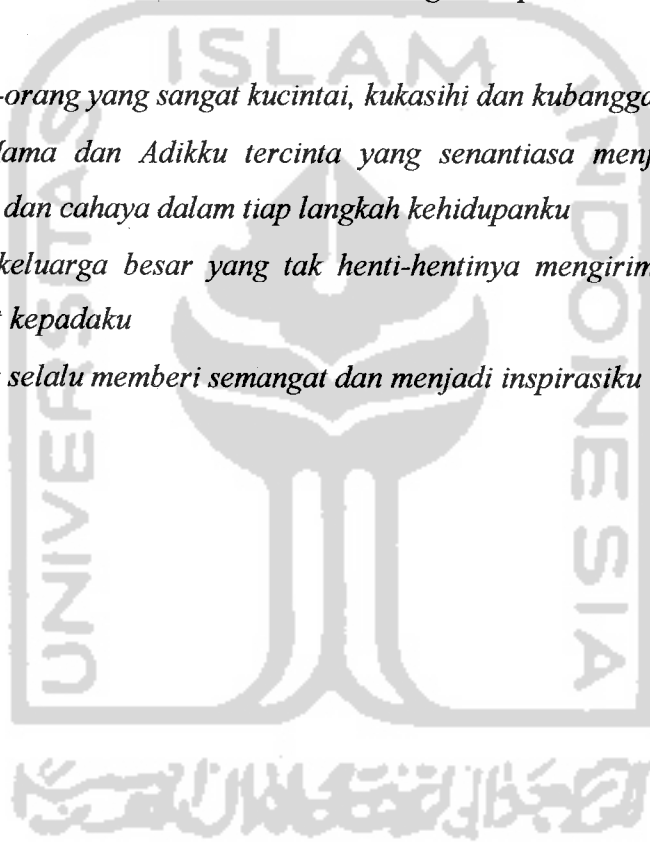
HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

Allah SWT, Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya

Orang-orang yang sangat kucintai, kukasihi dan kubanggakan

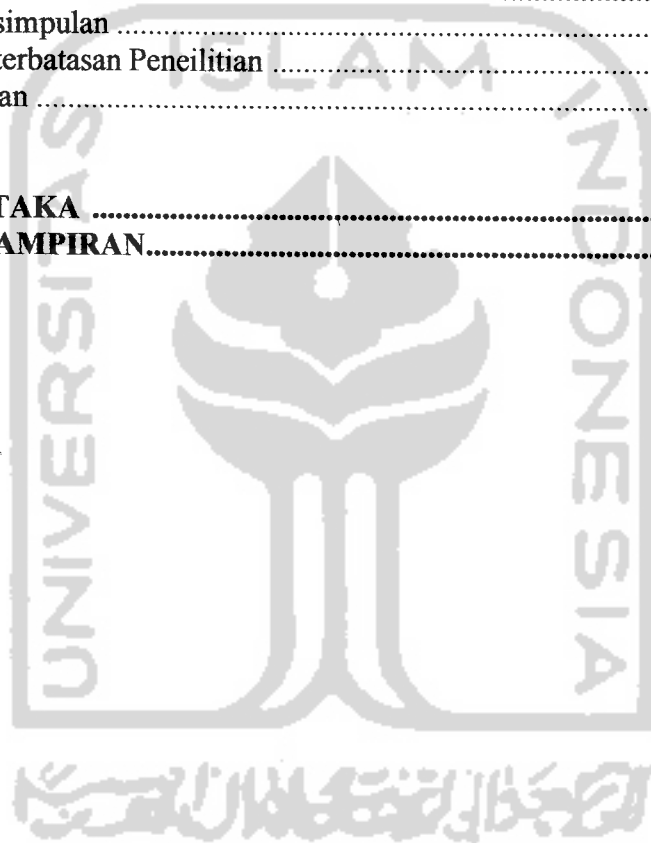
- * *Papa, Mama dan Adikku tercinta yang senantiasa menjadi motivasi, kekuatan dan cahaya dalam tiap langkah kehidupanku*
- * *Seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya mengirimkan doa dan semangat kepadaku*
- * *Arif yang selalu memberi semangat dan menjadi inspirasiku*



DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiatisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara Ujian	v
Kata Pengantar	vi
Halaman Moto	ix
Halaman Persembahan	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Belanja Daerah	9
2.1.1 Belanja Rutin	11
2.1.2 Belanja Pembangunan	12
2.2 Dana Alokasi Umum	12
2.3 Pendapatan Asli Daerah	15
2.3.1 Pajak Daerah	16
2.3.2 Retribusi Daerah	18
2.3.3 Bagian Laba Usaha Daerah	19
2.3.4 Lain-lain Pendapatan yang Sah	20
2.4 Penelitian Terdahulu dan Penarikan Hipotesis	20
2.4.1 Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah	21
2.4.2 Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah	23
2.4.3 <i>Flypaper Effect</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Populasi dan Sampel	26
3.2 Data dan Sumber Data	26
3.3 Definisi Operasional Variabel	27
3.3.1 Belanja Daerah	27
3.3.2 Dana Alokasi Umum	28
3.3.3 Pendapatan Asli Daerah	28
3.4 Alat Analisis	29

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Analisis Deskriptif	31
4.2 Analisis Statistik.....	32
4.2.1 Analisis Pengaruh DAU_t dan PAD_t terhadap BD_t	32
4.2.2 Analisis Pengaruh DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} terhadap BD_t	36
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	41
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Keterbatasan Penelitian	46
5.3 Saran	47
 DAFTAR PUSTAKA	 49
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	51



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	31
Tabel 4.2 Regresi Sederhana Pengaruh DAU_t dan PAD_t terhadap BD_t	33
Tabel 4.3 Regresi Berganda Pengaruh DAU_t dan PAD_t terhadap BD_t	35
Tabel 4.4 Analisis Faktor Paling Dominan Berpengaruh Terhadap BD_t	36
Tabel 4.5 Regresi Sederhana Pengaruh DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} terhadap BD_t	37
Tabel 4.6 Regresi Berganda Pengaruh DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} terhadap BD_t	39
Tabel 4.7 Analisis Faktor Paling Dominan Berpengaruh Terhadap BD_t	40



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Ringkasan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2002-2005	50
---	----

LAMPIRAN 2

Ringkasan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2002-2005	54
--	----

LAMPIRAN 3

Ringkasan Realisasi Belanja Daerah (BD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2002-2005	58
---	----

LAMPIRAN 4

Analisis Regresi Sederhana Pengaruh PAD_t Dan DAU_t Terhadap BD_t	62
---	----

LAMPIRAN 5

Analisis Regresi Sederhana Pengaruh PAD_{t-1} Dan DAU_{t-1} Terhadap BD_t ...	63
---	----

LAMPIRAN 6

Analisis Regresi Berganda Pengaruh PAD_t Dan DAU_t Terhadap BD_t	64
--	----

LAMPIRAN 7

Analisis Regresi Berganda Pengaruh PAD_{t-1} Dan DAU_{t-1} Terhadap BD_t	65
--	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perubahan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah serta untuk melihat perbedaan respon yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap perubahan PAD dan DAU untuk mendeteksi terjadinya suatu kondisi yang disebut dengan flypaper effect. Flypaper effect adalah suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer dari pemerintah pusat (DAU) lebih besar dari pada stimulus yang disebabkan oleh perubahan pendapatan asli daerah (PAD) atau respon belanja daerah terhadap penerimaan DAU berbeda dengan penerimaan PAD.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY dan BPS DKI Jakarta. Sampel yang digunakan adalah terdiri dari 114 kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Data diolah dengan menggunakan alat analisis regresi sederhana untuk melihat pengaruh PAD dan DAU terhadap BD secara terpisah dan juga menggunakan regresi berganda untuk melihat pengaruh PAD dan DAU terhadap BD secara serentak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap BD. PAD juga memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap BD. Sedangkan ketika keduanya dibandingkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh DAU lebih besar daripada PAD, hal ini menunjukkan adanya flypaper effect. Yang mana berarti pemerintah daerah masih sangat bergantung dari transfer dari pusat dalam bentuk DAU dan belum cukup siap dan mandiri dalam menghadapi era otonomi daerah.

Kata Kunci : *Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah (BD) dan Flypaper Effect*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak keruntuhan kejayaan orde baru kita telah memasuki era reformasi. Dimana reformasi menuntut adanya keadilan dalam segala bidang baik itu politik maupun ekonomi bagi masyarakat di daerah. Hal ini dikarenakan adanya rasa ketidak puasan yang dirasakan oleh daerah karena sistem pemerintahan sentralisasi yang diterapkan semasa orde baru telah mengekang kebebasan daerah dan menyebabkan ketimpangan dalam bidang keuangan antara daerah dan pusat. Dan kini Indonesia tidak lagi menganut sistem pemerintahan sentralisasi namun sudah menggunakan sistem pemerintahan desentralisasi. Hal ini ditandai dengan telah diterapkannya otonomi daerah.

Otonomi daerah telah diterapkan sejak tanggal 1 Januari 2001. Dimana kebijakan tersebut adalah merupakan kebijakan yang demokratis dan telah memenuhi aspek desentralisasi secara keseluruhan. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar daerah. Selain itu penerapan otonomi daerah juga bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktifitas

perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional (Hadi Sasana, 2005).

Namun seiring dengan diterapkannya, otonomi daerah menimbulkan konsekuensi yakni daerah harus lebih mandiri dalam segala hal. Baik dalam hal pembiayaan, penentuan arah pembangunan daerah dan juga dalam manajemen keuangan daerah. Masalah ketidak siapan sumber daya manusia (SDM) di daerah juga menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakkan sebagai salah satu hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Hambatan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah dengan adanya pembatasan pemungutan pajak dan retribusi daerah seperti yang tertera dalam UU No 18 tahun 1997. Padahal pajak dan retribusi adalah penyumbang terbesar terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian pemerintah daerah akan mengalami tekanan keuangan (*fiscal stress*) karena terjadinya pembatasan sumber penerimaan. Dengan adanya kondisi ini jelas akan mempengaruhi kesiapan daerah dalam menghadapi era otonomi daerah (Bambang Haryadi, 2002).

Pengelolaan pemerintah daerah serta keuangan daerah baik tingkat Propinsi ataupun tingkat Kabupaten dan Kota sejalan dengan dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Namun kini seiring dengan perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang

Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam UU No 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dari Dana Perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan dan lain-lain Pendapatan.

Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Seharusnya dari transfer dari pemerintah pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik serta disajikan secara transparan dan akuntabel mengingat maksud dan tujuan dari transfer itu sendiri adalah sebagai pemerataan kemampuan fiskal suatu daerah atau menutup kesenjangan karena kebutuhan daerah ternyata melebihi potensi daerah itu sendiri.

Namun pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber utama bagi pemerintah daerah. Transfer dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah sangatlah besar. Mengingat tingginya jumlah transfer yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah maka ada kemungkinan bahwa jika terjadi perubahan dalam transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah maka akan terjadi perubahan pada kemampuan daerah dalam hal keuangan yang nantinya akan berimbas pada jumlah belanja yang mampu dikeluarkan untuk keperluan daerah.

Skripsi ini merupakan penelitian ulang (replikasi) dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Syukriy Abdullah dan Abdul Halim mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Bali dihasilkan analisis bahwa secara terpisah DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, baik dengan ataupun tanpa lag. Ketika tidak menggunakan lag, pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah lebih kuat dari pada DAU, tetapi dengan digunakan lag, pengaruh DAU terhadap belanja daerah justru lebih kuat dari pada PAD. Hal ini berarti terjadi *flypaper Effect* dalam respon Pemerintah Daerah terhadap DAU dan PAD. Ketika dua faktor tersebut (DAU dan PAD) diregres secara serentak dengan BD, pengaruh keduanya juga signifikan, baik menggunakan lag maupun tanpa lag.

Adapun perbedaan antara skripsi ini dan penelitian terdahulu adalah data dan sampel penelitian tidak sama dengan penelitian sebelumnya karena sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di seluruh

Sumatera. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Selain itu periode yang digunakan adalah tahun 2002-2005 sedangkan yang dulu hanya tahun 2003-2004, sehingga skripsi ini berjudul :

“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten /Kota di Sumatera)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah DAU dan PAD mempengaruhi belanja daerah pemerintah daerah ?
2. Apakah DAU dan PAD merupakan faktor untuk memprediksi belanja pemerintah daerah ?
3. Apakah terjadi *flypaper effect* pada pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris :

1. DAU dan PAD mempengaruhi Belanja Pemerintah Daerah.
2. DAU dan PAD merupakan faktor untuk memprediksi Belanja Pemerintah Daerah.
3. Kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah :

1. Bagi para aparat pemerintahan, penelitian ini akan membuka wawasan baru berkenaan dengan pengaruh jumlah DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan.
2. Bagi peneliti yang tertarik pada bidang kajian ini dapat menjadi referensi dan data tambahan.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang penggambaran teori yang melandasi penelitian ini meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah, *flypaper effect*, hasil penelitian terdahulu, dan formulasi hipotesis

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri dari populasi dan sampel, data dan sumber data , variabel penelitian dan metode analisis data

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pembahasan secara rinci tentang analisis data serta pembahasan hasil yang diperoleh.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

Otonomi daerah telah diberlakukan sejak awal tahun 2001. Yang mana hal tersebut menandakan bahwa daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri tanpa bergantung kepada pemerintah pusat. Kewenangan untuk dapat mengatur rumah tangga sendiri tersebut diartikan bahwa daerah bebas untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah. Namun hal ini bukan berarti pemerintah pusat tidak turut serta dalam pembangunan daerah. Kebijakan moneter masih menjadi kewenangan dari pemerintah pusat yang tidak diberikan kepada pemerintah daerah, selain itu stabilitas nasional dalam hal ketahanan dan keamanan tetap berada ditangan pemerintah pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah bukan tidak membawa kendala bagi pemerintah daerah. Kesiapan masing-masing daerah dalam segi keuangan dan non keuangan atau sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Agar otonomi dapat berjalan sesuai dengan harapan dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat mengelola segala bentuk penerimaan dan pengeluaran daerah secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan standar pelayanan publik. Secara garis besar penerimaan daerah berasal dari dua sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Sedangkan pengeluaran daerah adalah dalam bentuk Belanja Daerah.

2.1 Belanja Daerah

Era otonomi daerah yang menitikberatkan peranan pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakatnya ternyata telah menggeser paradigma pembangunan yang selama ini diterapkan, yang semula terfokus di pusat kini daerahpun dapat sedikit lebih leluasa ikut andil dalam pembangunan daerah.

Implikasi dengan adanya otonomi daerah ini, mengakibatkan adanya *sharing of power* dan sekaligus *sharing of financial*. *Sharing of power* dapat dicermati dengan adanya ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan *sharing of financial* dapat dicermati pada ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Di dalam ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 sendiri diatur beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini adalah permasalahan belanja daerah. Menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Belanja Daerah diartikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Dan rinciannya dapat dibagi dalam dua bentuk yakni berdasar sifat dan berdasar fungsinya. Berdasar sifat ekonominya belanja daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Sedangkan berdasarkan fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja untuk pembangunan

perumahan dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Beberapa pakar memiliki pendapat yang berbeda dengan UU yang ada mengenai bentuk-bentuk atau elemen-elemen belanja daerah. Perbedaan tersebut adalah dalam hal pengklasifikasian. Salah satunya adalah menurut Mardiasmo (2002), elemen-elemen yang termasuk dalam Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Aparatur Daerah, terdiri dari : Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat (publik).
2. Belanja Pelayanan Publik, terdiri dari : Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dampak dinikmati oleh masyarakat (publik).

3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pengeluaran uang dengan kriteria :
 - a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.
 - b. Tidak mengharap dibayar kembali pada masa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
 - c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layak yang diharapkan pada kegiatan investasi.
4. Belanja Tak Tersangka, seperti :
 - a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
 - b. Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum diselesaikan dan atau yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.
 - c. Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan.

Namun pada praktiknya belanja pemerintah daerah dibagi dalam 2 bentuk seperti yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah, yakni sebagai berikut :

2.1.1 Belanja Rutin

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah daerah membutuhkan beberapa kebutuhan pokok yang sifatnya rutin atau terus-menerus namun umumnya tidak menghasilkan wujud fisik. Sebagai contoh

belanja gaji dan horarium pegawai. Pemerintah mengeluarkan belanja gaji dan honorarium pegawai yang sifatnya rutin setiap bulan untuk menggaji pegawai tetap dan memberikan honorarium bagi pegawai tidak tetap. Selain itu juga terdapat belanja perjalanan dinas untuk membiayai perjalanan dinas pegawai dalam menjalankan urusan pemerintahan ke daerah lainnya dan juga terdapat belanja barang dan belanja lain-lain.

2.1.2 Belanja Pembangunan

Selain dari belanja rutin pemerintah juga mengeluarkan belanja yang sifatnya tidak rutin dan umumnya menghasilkan wujud fisik yang manfaatnya lebih dari satu tahun. Belanja pembangunan dikeluarkan oleh pemerintah yang mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena memang belanja pembangunan dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan publik. Sebagai contoh belanja untuk pembangunan jalan, gedung-gedung sekolah, rumah sakit, pembangunan jembatan dan sebagainya. Kesemuanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Diera otonomi daerah ini ternyata juga membawa perubahan pada pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya dalam hal sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penerimaan daerah diperoleh dari beberapa sumber antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah yang lain yang sah. Dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat ini sesungguhnya berasal dari dana yang dikumpulkan dari bagian hasil penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan (Sri Nawatmi, 2006). Dana perimbangan tersebut dapat berupa Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah, selain itu dana perimbangan dapat pula berupa Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Alokasi Umum adalah transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mana merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya. Dana Alokasi Umum tersebut bersumber dari APBN. DAU dimaksudkan sebagai pemerataan kemampuan fiskal suatu daerah atau menutup kesenjangan karena kebutuhan daerah ternyata melebihi potensi daerah itu sendiri. Diharapkan dari adanya DAU ini tiap daerah memiliki kemampuan yang sama dalam membiayai belanja daerahnya.

Dengan demikian daerah yang memiliki kapasitas fiskal atau potensi yang tinggi akan memperoleh DAU dalam jumlah yang relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan daerah yang minim akan potensi atau kapasitas fiskalnya. Namun dalam praktiknya masih banyak kelemahan. Daerah-daerah

yang kaya akan potensi juga memperoleh DAU dalam jumlah yang relatif besar. Hal ini tidak sejalan dengan konsep awal mengenai DAU.

Kondisi ini dicoba untuk diperbaiki dengan mengoreksi besar DAU yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah sehingga ada daerah mengalami penurunan jumlah DAUnya. Seiring dengan adanya koreksi akan besarnya DAU tersebut justru menimbulkan kecaman dari beberapa daerah yang mengalami penurunan alokasi DAU. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan cara pandang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap alokasi DAU. Bagi pemerintah pusat DAU dimaksudkan untuk pemerataan sedangkan bagi pemerintah daerah alokasi DAU dimaksudkan untuk mendukung kecukupan daerah dalam membiayai belanja daerahnya.

Mengenai formulasi DAU telah diutarakan dalam UU No 33 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. DAU dialokasikan dengan menggunakan dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Adapun yang dimaksud dengan celah fiskal tersebut adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Hasil perhitungan DAU baik itu untuk Propinsi maupun Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan penyalurannya pun dilakukan secara bertahap yakni setiap bulannya.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, salah satu bentuk penerimaan daerah adalah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada era sebelum otonomi daerah dimana sistem pemerintahan masih berbentuk sentralisasi ternyata membawa dampak yang kurang baik pada pembangunan daerah. Hal ini dapat terlihat dengan terhambatnya kebebasan daerah dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh daerahnya dan dampak lain yang tak kalah merugikannya adalah tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan besarnya andil dan intervensi yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap jalannya pemerintahan di tiap daerah.

Dan kini setelah era otonomi daerah, sistem pemerintahan tidak lagi berupa sentralisasi namun telah berupa desentralisasi. Artinya daerah telah memiliki kewenangan untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya daerah harus lebih mandiri dalam mengelola segala bentuk penerimaan dan pengeluarannya. Untuk dapat menjalankan pemerintahannya pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Namun banyak pihak yang masih salah kaprah mengenai otonomi daerah. Banyak pihak yang beranggapan bahwa otonomi daerah berarti setiap kebutuhan daerah harus dapat ditutupi dengan pendapatan asli daerah. Dan dampak dari kesalahan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan

asli daerah dengan meningkatkan pungutan pajak dan retribusi yang mana hal ini tentu sangat memberatkan bagi masyarakat daerah itu sendiri.

Pemahaman seperti itu sebenarnya kurang tepat. Otonomi daerah bukan berarti eksploitasi daerah dengan menghasilkan pendapatan asli daerah yang setinggi-tingginya. Jika otonomi daerah diartikan sebagai eksploitasi pendapatan asli daerah maka masyarakat daerahlah yang pada akhirnya yang akan terbebani (Mardiasmo, 2002).

Secara garis besar pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari pungutan daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU No 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Yang akan diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Pajak Daerah

Dalam menjalankan pemerintahan di daerah, daerah memerlukan sumber penerimaan yang diperoleh dari daerah. Salah satunya adalah dalam bentuk pajak daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai suatu pungutan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya dan sifatnya adalah memaksa. Secara lebih spesifik Sri Suranta dan Muhammad Syarifiqurrahman (2005) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan Undang-undang namun pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah dan pihak yang berwenang memungut pajak daerah adalah Pemerintah Daerah. Widiyanto (2004) mengklasifikasikan kembali pajak daerah menurut wilayah pemungutannya, yakni :

1. Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir

2. Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Propinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (PKB&KAA)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (BBNKB&KAA)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT&AP)

2.3.2 Retribusi Daerah

Bentuk lain dari pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Selain dari pajak daerah, retribusi daerah adalah penyumbang pendapatan asli daerah yang terbesar di hampir setiap daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Kesit Bambang Prakosa, 2003).

Sejalan dengan pajak daerah, retribusi daerah juga ditetapkan dengan Undang-undang dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah dan yang berhak memungut adalah pemerintah daerah. Hal ini dapat kita lihat dari adanya perbedaan besarnya retribusi dan biaya parkir di tiap daerah karena Peraturan Daerah yang ditetapkan berbeda antara daerah yang satu dan yang lainnya.

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok besar yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan (PP No 6 Tahun 2001 dalam Widiyanto, 2004). Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan, seperti

- retribusi atas pelayanan kesehatan, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor dan lain-lain.
- b. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, seperti retribusi atas pemakaian kekayaan daerah, terminal, tempat pelelangan, tempat khusus parkir dan lain-lain.
 - c. Retribusi perizinan adalah retribusi atas kegiatan tertentu perintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasaranan, sarana/fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan misalnya, retribusi atas izin mendirikan bangunan, izin trayek, izin gangguan dan lain-lain.

2.3.3 Bagian Laba Usaha Daerah

Selain pajak dan retribusi sumber pendapatan asli daerah adalah berasal dari bagian laba usaha daerah yang terdiri dari bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah. UU mengizinkan daerah untuk mendirikan perusahaan daerah (BUMD) yang nantinya diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kontribusi pembangunan. Kontribusi tersebut dapat berupa deviden yang dibayarkan kepada daerah dan kontribusi BUMD

kepada anggaran daerah atau juga dengan memanfaatkan kekayaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan daerah, yang dapat mendatangkan tambahan bagi penerimaan daerah (UU No 33 Tahun 2004).

2.3.4 Lain-lain pendapatan yang sah

Selain dari ketiga sumber yang telah diuraikan di atas sumber pendapatan asli daerah dapat pula diperoleh dari pendapatan lain-lain yang sah yang dapat meliputi hasil penjualan kekayaan daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah (UU No 33 Tahun 2004).

2.4 Penelitian Terdahulu dan Penarikan Hipotesis

Penelitian mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) juga pernah dilakukan oleh Syukriy Abdullah dan Abdul Halim (2003) mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah yang mengambil sampel Jawa dan Bali. Penelitian tersebut menghasilkan analisis bahwa secara terpisah DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, baik dengan ataupun tanpa lag. Ketika tidak menggunakan lag, pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih kuat dari pada DAU, tetapi dengan digunakan lag, pengaruh DAU terhadap belanja daerah justru lebih kuat dari pada PAD. Hal ini berarti terjadi *flypaper Effect*

dalam respon pemerintah daerah terhadap DAU dan PAD. Ketika dua faktor tersebut (DAU dan PAD) diregres secara serentak dengan BD, pengaruh keduanya juga signifikan, baik menggunakan lag maupun tanpa *lag*.

Penelitian juga pernah dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) dengan mengambil sampel Propinsi DIY dan Jawa Tengah. Hasil dari penelitian tersebut senada dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Syukriy Abdullah dan Abdul Halim (2003). Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

2.4.1 Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Banyak studi yang menyebutkan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja namun tak sedikit juga studi yang menyebutkan bahwa belanja yang mempengaruhi pendapatan. Namun studi empiris menyebutkan bahwa stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer sering lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan asli daerah atau terjadi *flypaper effect*.

Holtz-Eakin (1985) dalam Syukriy Abdullah&Abdul Halim (2003) menyatakan bahwa terdapat keterikatan yang sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja daerah. Penelitian Gamkhar&Oates (1996) dalam Syukriy Abdullah&Abdul Halim (2003) mengenai respon pemerintah

daerah terhadap perubahan jumlah transfer dari pemerintah federal di Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991 menyebutkan bahwa pengurangan jumlah transfer menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah.

Berdasarkan konsep di atas maka hipotesis untuk dapat melihat pengaruh DAU tahun berjalan (DAU_t) terhadap belanja daerah tahun berjalan (BD_t) dapat dinyatakan sebagai berikut :

H1a : DAU_t berpengaruh positif terhadap BD_t

Sering terjadi ketidak sesuaian antara dana alokasi umum (DAU) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan besarnya realisasi yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota mengakibatkan pemerintah daerah tidak sepenuhnya yakin bahwa jumlah yang telah ditetapkan tersebut akan diterima dan dapat digunakan dengan bebas oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Memen (2002) menunjukkan ketidak puasan pemerintah daerah terhadap rumusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh pemerintah Jember melakukan protes karena kecilnya DAU yang diterima yaitu sebesar Rp 300 Milyar, apabila dibandingkan dengan dengan belanja pegawai yang mencapai Rp 275 Milyar. Kasus lain yang terjadi adalah protes yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bekasi yang melakukan protes karena mereka hanya menerima DAU sebesar Rp 184,7 Milyar. Jumlah ini jauh dari perkiraan semula yang jumlahnya mencapai Rp 250 Milyar-Rp 800 Milyar. Dengan adanya berbagai kasus tersebut maka keputusan pemerintah daerah tentang

belanja daerahnya sering menggunakan dasar DAU yang diterima tahun sebelumnya.

Studi Holtz-Eakin *et al* (1985) dalam Syukriy Abdullah&Abdul Halim (2003) menemukan bahwa transfer tahun lalu dapat memprediksi belanja tahun ini, namun sebaliknya belanja tahun lalu tidak dapat memprediksi pendapatan tahun berjalan. Hipotesis untuk dapat melihat pengaruh DAU tahun lalu (DAU_{t-1}) terhadap belanja daerah tahun berjalan (BD_t) dapat dinyatakan sebagai berikut :

H1b : DAU_{t-1} berpengaruh positif terhadap BD_t

2.4.2 Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Dalam konteks internasional, beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja menemukan bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus pemerintah daerah di beberapa negara Amerika Latin, yakni Kolumbia, Republik Dominika, Honduras dan Paraguay. Friedman, 1978 dalam Kesit Bambang Prakosa, 2004 menyatakan bahwa kenaikan pajak akan meningkatkan kenaikan belanja.

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya Aziz *et al*, 2000; Blackley, 1986; Joulfaian & Mokeerjee, 1990; Legrensi & milas, 2001; Von Furstenberg *et al*, 1986 dalam Syukriy Abdullah&Abdul Halim, 2003). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan (terutama pajak) akan memengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis* (Aziz *et*

al, 2000; Doi, 1998; Von Furstenberg *et al*, 1998 dalam Syukriy Abdullah&Abdul Halim, 2003). Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam pendapatan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Hipotesis untuk menguji pengaruh PAD terhadap BD_t adalah sebagai berikut :

H2a : PAD_t berpengaruh positif terhadap BD_t

H2b : PAD_{t-1} berpengaruh positif terhadap BD_t

2.4.3 Flypaper Effect

Flypaper effect adalah suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer dari pemerintah pusat lebih besar dari pada stimulus yang disebabkan oleh perubahan pendapatan daerah.

Studi Andersson (2002) dalam Syukriy Abdullah&Abdul Halim (2003) tentang perubahan sistem transfer terhadap pengeluaran pemerintah daerah Swedia menemukan bahwa kenaikan jumlah transfer akan menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah daerah, berbeda dengan akibat dari kenaikan dalam pendapatan yang bersumber dari pajak.

Penelitian Legrenzi dan Milas (2001) dalam Syukriy Abdullah&Abdul Halim (2003) juga memberikan bukti empiris tentang adanya *flypaper effect* dalam jangka panjang untuk sampel *municipalities* di Italia. Zampelli (1986) dalam Syukriy Abdullah&Abdul Halim (2003) memberikan bukti senada

untuk data pemerintah kota di Amerika Serikat, yakni terjadinya *flypaper effect* dalam reaksi belanja terhadap *unconditional grants*. Karena itu *flypaper effect* dianggap sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai (tambahan) pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga mestinya dihabiskan (dibelanjakan) dengan cara yang sama pula (Hines & Thaler, 1995; dalam Kesit Bambang Prakosa, 2004).

Hipotesis untuk menguji adanya *flypaper effect* ini adalah :

H3a : Pengaruh DAU_t terhadap BD_t lebih besar dari pada pengaruh PAD_t terhadap BD_t

H3b : Pengaruh DAU_{t-1} terhadap BD_t lebih besar dari pada pengaruh PAD_{t-1} terhadap BD_t

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang terdapat di Sumatera dan sampel yang digunakan adalah 114 Kabupaten/Kota di Sumatera. Yang terdiri dari 16 Kabupaten dan 4 Kota di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 14 Kabupaten dan 7 Kota di Propinsi Sumatera Utara, 9 Kabupaten dan 7 Kota di Propinsi Sumatera Barat, 9 Kabupaten dan 2 Kota di Propinsi Riau, 7 Kabupaten dan 4 Kota di Propinsi Sumatera Selatan, 9 Kabupaten dan 1 Kota di Propinsi Jambi, 3 Kabupaten dan 1 Kota di Propinsi Bengkulu, 8 Kabupaten dan 2 Kota di Propinsi Lampung, 5 Kabupaten dan 1 Kota di Propinsi Bangka Belitung, 3 Kabupaten dan 2 Kota di Propinsi Kepulauan Riau.

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2002-2005 yang berupa realisasi Belanja Daerah (BD), realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera yang diperoleh dari BPS Yogyakarta dan BPS DKI Jakarta.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel terikat (*Dependent Variabel*) dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah dan variabel bebas (*Independent Variabel*) adalah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah.

3.3.1 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode bersangkutan atau segala bentuk pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan kepada pemerintah pusat.

Pada praktiknya belanja daerah dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

a. Belanja Rutin

Belanja rutin adalah belanja yang sifatnya terus-menerus untuk setiap tahun fiskal dan umumnya tidak menghasilkan wujud fisik. Misalnya : belanja gaji, honorarium pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja barang.

b. Belanja Pembangunan

Belanja Pembangunan adalah belanja yang umumnya menghasilkan wujud fisik yang manfaatnya lebih dari satu tahun dan tidak bersifat rutin. Misalnya : pembangunan jembatan, jalan, gedung.

3.3.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah bagian dari Dana Perimbangan, selain Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Propinsi.

3.3.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari pungutan daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Misalnya pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, lain-lain pendatan yang sah. Besarnya pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang (Mamesah, 1995).

3.4 Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana (*simple regression*) dan regresi berganda (*multiple regression*). Analisis regresi sederhana digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing jumlah DAU dan PAD terhadap jumlah belanja daerah (BD) dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_t = a + bx_t + e$$

Dimana:

Y_t : Jumlah Belanja

a : Konstanta

b : Koefisien regresi

x_t : Jumlah DAU_t(DAU_{t-1}) atau PAD_t(PAD_{t-1})

e : Error term

Regresi berganda digunakan untuk memprediksi apakah komponen-komponen pendapatan daerah tersebut secara serempak mempengaruhi Belanja Daerah. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_t = a + b_1X_{1t} + b_2X_{2t} + e$$

Keterangan :

Y_t : Jumlah Belanja

a : Konstanta

$b_1 b_2$: Koefisien Regresi

X_{1t} : DAU_t(DAU_{t-1})

X_{2t} : PAD_t(PAD_{t-1})

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah (BD) pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera. Dalam bab ini akan membahas mengenai analisis data yang telah terkumpul. Data yang telah dikumpulkan tersebut berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 yang diperoleh dari BPS Yogyakarta dan BPS DKI Jakarta.

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang telah dikemukakan, serta kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis statistik merupakan analisis yang mengacu pada perhitungan data penelitian yang berupa angka-angka yang dianalisis dengan bantuan komputer melalui program Eviews. Sedangkan analisis deskriptif merupakan analisis yang menjelaskan gambaran data-data variabel penelitian yang terdiri dari nilai tertinggi dan nilai terendah.

4.1 Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif

(dalam ribuan rupiah)

Nama Variabel	Terendah	Tertinggi
PAD (t)	626,150	282.228.792
DAU (t)	12,487,790	501,049,820
BJD (t)	50,297,112	1,553,930,904

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.1, jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi sampel adalah 114 Kabupaten/Kota di Sumatera dengan rincian sebanyak 83 Kabupaten dan 31 Kota di Sumatera. Nilai PAD tertinggi adalah Kota Medan Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp 282.228.792.000 dan nilai terendah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Nanggro Aceh Darusalam pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp 626.150.000.

Sedangkan untuk dana alokasi umum (DAU) tertinggi adalah Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2003 dengan yaitu sebesar Rp 501.049.820.000. Nilai terendah DAU adalah Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp 12.487.790.000.

Untuk belanja daerah tertinggi adalah Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp 1.553.930.904.000. Sedangkan Belanja Daerah terendah adalah Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp.50.297.112.000.

4.2 Analisis Statistik

Analisis statistik merupakan analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Analisis ini terbagi menjadi 2 analisis yaitu Analisis Regresi Sederhana dan Analisis Regresi Berganda.

4.2.1. Analisis Pengaruh DAU_t dan PAD_t terhadap BD_t

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing DAU dan PAD pada tahun berjalan terhadap BD tahun berjalan. Untuk mempermudah perhitungan regresi dari data yang cukup banyak maka dalam penelitian ini diselesaikan dengan bantuan perangkat lunak (*soft ware*) komputer yaitu program Eviews.

Hasil Regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Analisis Pengaruh DAU_t dan PAD_t terhadap BD_t

	Koefisien	Adj. Rsquare	t statistik	F statistik	Sig.
Constanta	99549663.06050	0.20096	10.48349	109.90361	0.00000
DAU t	1.31065				
Constanta	299208790.61132	0.01191	2.49410	6.2205	0.01300
PAD t	0.18765				

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y_t = a + bx_t + e$$

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi sederhana maka didapat persamaan tentang pengaruh DAU dan PAD terhadap BD di Sumatera sebagai berikut :

$$BD_t = 99549663,06050 + 1,31065 \text{ DAU } t \dots\dots\dots 1$$

$$BD_t = 299208790,61132 + 0,18765 \text{ PAD } t \dots\dots\dots 2$$

Dari persamaan 1 dan persamaan 2 dapat diartikan bahwa jika tidak ada DAU maka besarnya BD akan sama dengan konstantanya yaitu sebesar Rp 99549663,06050 dan jika tidak ada PAD maka BD akan sebesar Rp 299208790,61132.

Namun jika dipengaruhi oleh DAU sebesar 1% maka BD akan meningkat sebesar 1,31065% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Begitu juga bila dipengaruhi oleh PAD sebesar 1% maka BD akan meningkat sebesar 0,18765% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa untuk DAU_t diperoleh t statistik sebesar 10,48349 dan p -value sebesar 0,0000 yang nilainya kurang dari 0,05, maka $H1a$ dapat diterima, yang berarti DAU_t berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap BD_t . Hal ini berarti semakin tinggi dana alokasi umum tahun berjalan (DAU_t) maka semakin besar pula belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatera. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat diterima.

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa untuk PAD_t diperoleh t statistik sebesar 2,49410 dan p -value sebesar 0,01300 yang nilainya kurang dari 0,05, maka $H2a$ diterima, yang berarti PAD_t berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap BD_t . Hal ini berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah (PAD_t) maka semakin besar pula belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatera. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat diterima.

Sedangkan analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh DAU_t dan PAD_t terhadap BD_t dan hasil selengkapnya dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.3.
Analisis Pengaruh DAU_t dan PAD_t terhadap BD_t

Model	Koefisien	t statistik	Sig-t	F Statistik	Sig F	Adj. Rsquare
(Constant)	99095449.4509	4.5921	0.0000	57.50932	0.00000	0.206987
DAU (t)	1.2930	10.3570	0.0000			
PAD (t)	0.1398	2.0689	0.0391			

Dari tabel 4.3 tersebut, menunjukkan bahwa nilai F statistiknya 57,50932 dan Adjusted R Square sebesar 0,206987 artinya 20,69% kedua variabel (DAU dan PAD) secara bersama-sama dapat menjelaskan model dari penelitian ini dan sisanya sebesar 79,31% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAU dan PAD pada tahun berjalan bersama-sama berpengaruh secara signifikan (0,00000) terhadap BD tahun berjalan.

Sedangkan untuk melihat variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap BD, maka dibandingkan nilai t statistiknya kedua variabel tersebut ketika diregresikan secara partial dengan ketika diregresikan secara serentak. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Analisis Faktor yang Paling Dominan Berpengaruh Terhadap BD

Variabel	Reg-Partial t statistik	Reg-Serentak t statistik	Selisih
1. DAU _t	10.48349	10.3570	-0.1265
2. PAD _t	2.49410	2.0689	-0.4252

Hasil uji t statistik dari regresi parsial ke regresi serentak untuk DAU hanya mengalami penurunan sebesar 0,1265, sedangkan untuk PAD terjadi penurunan sebesar 0,4252. Dengan demikian DAU tahun berjalan terhadap BD tahun berjalan secara signifikan lebih kuat dibandingkan dengan PAD tahun berjalan. Dengan demikian hipotesis H3a yang menyatakan pengaruh DAU_t terhadap BD_t lebih besar daripada pengaruh PAD_t terhadap BD_t dapat diterima.

4.2.2. Analisis Pengaruh DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} terhadap BD_t

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing PAD_{t-1} dan DAU_{t-1} terhadap BD_t. Untuk mempermudah perhitungan regresi dari data yang cukup banyak maka dalam penelitian ini diselesaikan dengan bantuan perangkat lunak (*soft ware*) komputer yaitu program Eviews.

Hasil Regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut..

Tabel 4.5
Analisis Pengaruh DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} terhadap BD_t

	Koefisien	Adj. Rsquare	t statistik	F statistik	Sig.
Constanta	78370086.51935	0.33172	12.64297	159.84465	0.00000
DAU _{t-1}	1.57087				
Constanta	248693515.85523	0.27275	11.00070	121.0153	0.00000
PAD _{t-1}	5.08327				

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y_t = a + bx_i + e$$

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi sederhana maka didapat persamaan tentang pengaruh DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} terhadap BD_t di Sumatera sebagai berikut :

$$BD_t = 78370086,51935 + 1,57087 \text{ DAU}_{t-1} \dots\dots\dots 3$$

$$BD_t = 248693515,85523 + 5,08327 \text{ PAD}_{t-1} \dots\dots\dots 4$$

Dari persamaan 3 dan persamaan 4 dapat diartikan bahwa jika tidak ada DAU tahun lalu maka besar BD tahun berjalan akan sama dengan konstantanya yaitu sebesar Rp 78370086,51935 ribu, dan jika tidak ada PAD tahun lalu maka BD akan sebesar Rp 248693515,85523.

Namun jika dipengaruhi oleh DAU tahun lalu sebesar 1% maka BD akan meningkat sebesar 1,57087% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Begitu juga bila dipengaruhi oleh PAD tahun lalu sebesar 1% maka BD akan meningkat sebesar 5,08327% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa untuk DAU_{t-1} diperoleh t statistik sebesar 12,64297 dan *p-value* sebesar 0,0000 yang nilainya kurang dari 0,05, maka H1b diterima, yang berarti DAU_{t-1} berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap BD_t . Hal ini berarti semakin tinggi dana alokasi umum tahun lalu (DAU_{t-1}) maka semakin besar pula belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatera pada tahun berjalan (BD_t). Dengan demikian H1b dalam penelitian ini dapat diterima.

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa untuk PAD_{t-1} (tahun lalu) diperoleh t statistik sebesar 11,00070 dan *p-value* sebesar 0,0000 yang nilainya kurang dari 0,05, maka H2b diterima, yang berarti PAD_{t-1} berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap BD_t . Hal ini berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah tahun lalu (PAD_{t-1}) maka semakin besar pula belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatera pada tahun berjalan (BD_t).

Sedangkan analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} terhadap BD_t , dan hasil selengkapnya dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.6.
Analisis Pengaruh DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} tahun lalu terhadap BD_t

Model	Koefisien	t statistik	Sig-t	F Statistik	Sig F	Adj. Rsquare
(Constant)	81852446.8805	4.0307	0.0001	128.52830	0.00000	0.443533
$DAU_{(t-1)}$	1.2115	9.9449	0.0000			
$PAD_{(t-1)}$	3.5039	8.0682	0.0000			

Dari tabel 4.3 tersebut, menunjukkan bahwa nilai F statistiknya 128,52830 dan Adjusted R Square sebesar 0,443533 artinya 44,35% kedua variabel (DAU dan PAD) pada tahun lalu secara bersama-sama dapat menjelaskan model dari penelitian ini dan sisanya sebesar 55,65% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAU dan PAD pada tahun lalu bersama-sama berpengaruh secara signifikan (0,00000) terhadap BD tahun berjalan.

Sedangkan untuk melihat variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap BD , maka dibandingkan nilai t statistiknya kedua variabel tersebut ketika diregresikan secara partial dengan ketika diregresikan secara serentak. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7

Analisis Faktor yang Paling Dominan Berpengaruh Terhadap BD

Variabel	Reg-Partial t statistik	Reg-Serentak t statistik	Selisih
1. DAU t	12.64297	9.9449	-2.69807
2. PAD t	11.00070	8.0682	-2.9325

Hasil uji t statistik dari regresi parsial ke regresi serentak untuk DAU hanya mengalami penurunan sebesar 2,69807, sedangkan untuk PAD terjadi penurunan sebesar 2,9325. Hasil ini berarti terjadi *flypaper Effect* , yaitu signifikansi DAU_{t-1} lebih tinggi daripada PAD_{t-1} . Artinya kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU_{t-1} daripada PAD_{t-1} atau respon belanja daerah terhadap penerimaan DAU berbeda dengan penerimaan PAD. Dengan demikian hipotesis H3b yang menyatakan pengaruh DAU_{t-1} terhadap BD_t lebih besar daripada pengaruh PAD_{t-1} terhadap BD_t dapat diterima

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil analisis pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa DAU tahun berjalan berpengaruh secara positif signifikan terhadap BD tahun berjalan. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa DAU tahun lalu berpengaruh secara positif signifikan terhadap BD tahun berjalan. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) yang menemukan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan dana alokasi umum merupakan bentuk transfer dana yang paling penting selain bagi hasil. Transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum adalah merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada tiap daerah sebagai konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Adapun tujuan dari transfer ini adalah sebagai pemerataan kemampuan fiskal suatu daerah dan mengurangi kesenjangan keuangan karena kebutuhan daerah ternyata melebihi potensi daerah itu sendiri, sehingga diharapkan daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Hal ini pun juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Holtz-Eakin (1985) dalam Syukriy Abdullah&Abdul Halim (2003) menyatakan bahwa terdapat keterikatan yang sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja daerah. Penelitian Gamkhar&Oates (1996) dalam Syukriy Abdullah&Abdul Halim (2003) mengenai respon pemerintah daerah terhadap perubahan jumlah transfer dari pemerintah federal di Amerika

Serikat untuk tahun 1953-1991 menyebutkan bahwa pengurangan jumlah transfer menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah.

Sering terjadi ketidak sesuaian antara dana alokasi umum (DAU) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan besarnya realisasi yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota mengakibatkan pemerintah daerah tidak sepenuhnya yakin bahwa jumlah yang telah ditetapkan tersebut akan diterima dan dapat digunakan dengan bebas oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Memen (2002) menunjukkan ketidakpuasan pemerintah daerah terhadap rumusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya berbagai kasus yang terjadi selama ini maka keputusan pemerintah daerah tentang belanja daerahnya sering menggunakan dasar DAU yang diterima tahun sebelumnya.

Pada hasil pengujian hipotesis kedua, telah dibuktikan bahwa PAD tahun berjalan maupun PAD tahun lalu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap BD tahun berjalan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) yang menyatakan bahwa DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah. Semakin besar nilai PAD maka semakin besar pula stimulus untuk meningkatkan belanja daerah. Dimana belanja daerah ini terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin sifatnya terjadi terus menerus berulang untuk setiap tahun fiskal dan umumnya tidak menghasilkan wujud fisik. Yang termasuk dalam belanja rutin antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja bunga pinjaman, dan belanja lain-lain. Sedangkan Belanja Pembangunan merupakan belanja yang menghasilkan wujud fisik yang manfaatnya lebih dari satu tahun, seperti jalan, jembatan, gedung dan sebagainya. Jadi semakin besar pendapatan yang diperoleh dari PAD maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat belanja rutin maupun belanja pembangunan.

Pada hasil pengujian hipotesis ketiga ditunjukkan bahwa pengaruh DAU tahun berjalan maupun DAU tahun lalu mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh PAD tahun berjalan maupun PAD tahun lalu terhadap BD tahun berjalan. Hal ini berarti ditemukan *flypaper effect*, artinya kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD atau respon belanja daerah terhadap penerimaan DAU berbeda dengan penerimaan PAD.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Legrenzi dan Milas (2001) dalam Syukriy Abdullah&Abdul Halim (2003) juga memberikan bukti empiris tentang adanya *flypaper effect* dalam jangka panjang untuk sampel *municipalities* di Italia. Zampelli (1986) dalam Syukriy Abdullah&Abdul Halim (2003) memberikan bukti senada untuk data pemerintah kota di

Amerika Serikat, yakni terjadinya *flypaper effect* dalam reaksi belanja terhadap *unconditional grants*.

Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) dinyatakan bahwa dalam model prediksi BD, daya prediksi DAU terhadap BD tetap lebih tinggi dibandingkan dengan daya prediksi PAD dan hal tersebut telah menunjukkan terjadinya *flypaper Effect*. *Flypaper-effect* dipandang sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai tambahan pendapatan masyarakat seperti halnya pajak daerah, sehingga semestinya dihabiskan (dibelanjakan) dengan cara yang sama pula (Hines & Thaler, 1995; dalam Kesit Bambang Prakosa, 2004).

Kondisi *flypaper Effect* apabila berlangsung terus maka otonomi daerah kemungkinan besar akan sangat terhambat. Masih timbulnya *flypaper effect* menandakan daerah belum siap dalam menghadapi otonomi daerah karena daerah masih belum mandiri. Hal itu terbukti dari besarnya ketergantungan daerah akan transfer dana yang berasal dari pemerintah pusat. Permasalahan yang perlu dipecahkan agar tidak terjadi *flypaper effect* yang tidak lain gambaran sikap ketergantungan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pemerintah pusat, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menggali potensi pendapatan asli daerah menjadi sangat penting. Disisi lain efektivitas belanja daerah juga perlu menjadi perhatian, karena bukan rahasia umum lagi setiap akhir tahun anggaran terjadi penghabisan anggaran belanja, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menunggu beberapa alokasi DAU yang diperolehnya sebelum menentukan berapa belanja yang akan dihabiskannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :

1. Dana alokasi umum (DAU) pada tahun berjalan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah (BD) tahun berjalan. Hal ini berarti semakin tinggi DAU yang diterima dari pemerintah pusat maka semakin besar belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatera. Begitu juga dengan DAU pada tahun lalu juga terbukti berpengaruh secara signifikan positif terhadap BD tahun berjalan. Artinya semakin besar DAU tahun lalu yang diterima dari pemerintah pusat maka semakin besar pula BD tahun berjalan Kabupaten/Kota di Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah di Pulau Sumatera masih sangat bergantung kepada besarnya dana alokasi umum yang berasal dari pemerintah pusat.
2. Pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun berjalan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah (BD) tahun berjalan. Hal ini berarti semakin tinggi PAD yang diperoleh dari pajak, retribusi, laba usaha daerah serta pendapatan lain-lain yang sah maka semakin besar belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatera. Begitu juga dengan PAD tahun lalu juga terbukti berpengaruh secara signifikan positif

terhadap BD tahun berjalan. Artinya semakin besar PAD tahun lalu maka semakin besar pula BD tahun berjalan Kabupaten/Kota di Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan yang diperoleh dari PAD maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat belanja rutin maupun belanja pembangunan.

3. Dalam model prediksi BD tahun berjalan, daya prediksi DAU tahun berjalan lebih tinggi dibandingkan dengan PAD tahun berjalan. Begitu juga dengan DAU tahun lalu memiliki pengaruh yang lebih besar daripada pengaruh PAD tahun lalu terhadap BD tahun berjalan. Hal ini menunjukkan telah terjadi *flypaper effect* artinya kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD atau respon belanja daerah terhadap penerimaan DAU berbeda dengan penerimaan PAD.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi selanjutnya. Studi ini dilakukan pada Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera secara menyeluruh. Sedangkan setiap Kabupaten/Kota akan memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam hal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga kesimpulan yang didapatkan hanya bersifat umum, tidak spesifik pada Kabupaten/Kota tertentu.

Setiap Kabupten/Kota di Sumatera memiliki industri daerah (BUMD) yang berbeda-beda, sehingga tingkat pendapatan daerah yang bersumber dari industri ini juga bervariasi. Sedangkan dalam penelitian ini tidak memasukkan efek industri (besar kecilnya) pendapatan dari industri yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota.

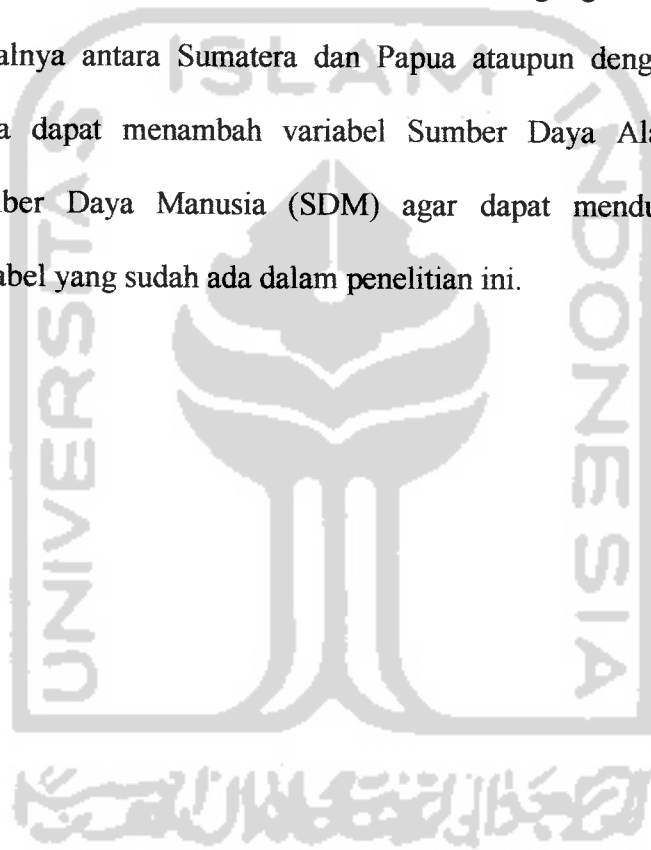
Penelitian ini juga hanya menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Sumatera dan data yang digunakan adalah data untuk 4 tahun yaitu tahun 2002, 2003, 2004 dan 2005 sehingga belum dapat dilakukan analisis yang lebih komprehensif. Untuk itu pada penelitian-penelitian selanjutnya perlu adanya penambahan data baik untuk jumlah kurun waktu maupun jumlah daerah.

5.3 Saran

1. Bagi pemerintah daerah agar dapat berusaha untuk mengoptimalkan tingkat pendapatan asli daerah misalnya dengan membentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah secara jelas dan tegas, sehingga sumber-sumber pendapatan daerah mampu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengimbangi pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat.
2. Bagi pemerintah pusat sebaiknya dalam menyampaikan APBN tentang DAU jauh sebelum tahun anggaran berjalan sehingga daerah dapat menyusun APBD dengan lebih baik. Daerah akan lebih siap menaksir

jumlah belanja tahun berjalan, serta kebijakan pajak dan retribusi daerah apabila masih terdapat *gap* antara DAU dan PAD.

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel yang digunakan agar dapat dibandingkan bagaimana kondisi di daerah yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda. Misalnya antara Sumatera dan Papua ataupun dengan Pulau Jawa. Serta dapat menambah variabel Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat mendukung variabel-variabel yang sudah ada dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali", *Simposium Nasional Akuntansi VI*, Surabaya, 16-17 Oktober, 2003.
- Haris, Syamsuddin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005.
- Haryadi, Bambang, "Analisis Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Kajian Empiris di Propinsi Jawa Timur)", *Simposium Nasional Akuntansi V*, Semarang, 5-6 September, 2002.
- Kustiawan, Memen, "Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang Proporsional (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat)", *Simposium Nasional Akuntansi IV*, 2001.
- Mamesah, D. J., *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Nawatmi, Sri, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Bantuan Pemerintah Pusat di Lima Kabupaten/Kota di Jawa Tengah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 13 No 2*, September, 2006.
- Nordiawan, Deddi, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2006
- Prakosa, Bambang Kesit, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah ; Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY", *JAAL Vol 08 No 2*, Desember, 2004.
- _____, "Pajak dan Retribusi Daerah", UII Press, Yogyakarta, 2003.

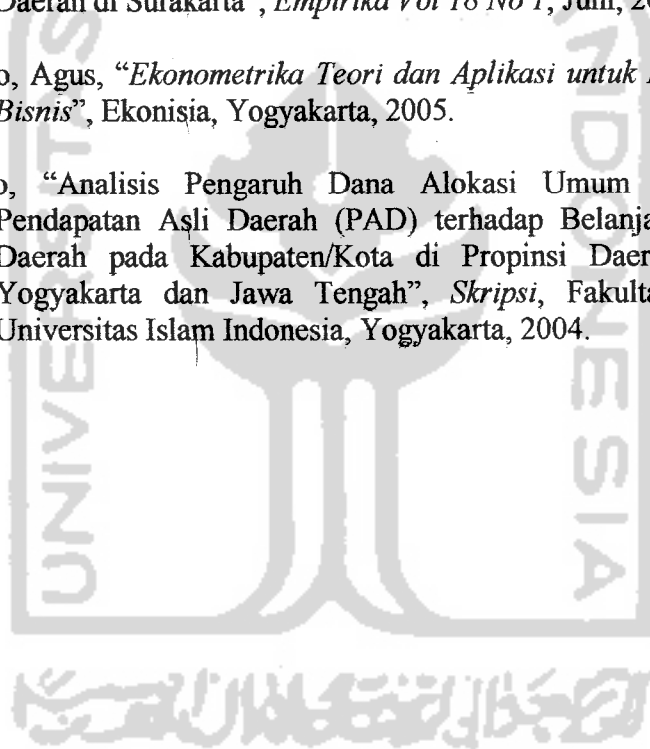
Republik Indonesia, *Undang-Undang Otonomi Daerah(Undang-Undang No 32 dan 33 Tahun 2004)*, Media Abadi, Yogyakarta, 2005.

Sasana, Hadi, "Analisis Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Antar Wilayah, Antar Sektor di Kabupaten/Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 12 No 2*, September, 2005.

Suranta, Sri dan Muhammad Syafiqurrahman, "Eksistensi Pajak Daerah melalui Pajak Parkir sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Surakarta", *Empirika Vol 18 No 1*, Juni, 2005.

Widarjono, Agus, "*Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*", Ekonisia, Yogyakarta, 2005.

Widiyanto, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004.



LAMPIRAN 1

RINGKASAN REALISASI DANA ALOKASI UMUM (DAU)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA

TAHUN ANGGARAN

2002-2005

(000 Rupiah)

Provinsi	Kabupaten/Kota	2002	2003	2004	2005
Nanggroe Aceh Darussalam	Simeule	64,290,000	90,040,000	90,043,000	105,355,000
	Aceh Singkil	106,920,000	106,030,000	97,754,000	117,849,000
	Aceh Selatan	137,520,000	114,250,000	128,694,260	145,661,000
	Aceh Tenggara	125,560,000	94,378,630	122,468,000	154,156,000
	Aceh Timur	180,100,000	139,030,000	143,900,000	159,002,000
	Aceh Tengah	146,110,000	149,680,000	158,675,000	120,251,000
	Aceh Barat	248,525,538	76,300,000	117,069,995	139,496,000
	Aceh Besar	167,020,000	192,200,000	192,200,000	192,000,000
	Pidie	182,790,000	221,770,000	233,016,000	242,139,000
	Bireuen	138,870,000	153,950,000	159,955,540	183,715,000
	Aceh Utara	117,230,000	149,120,000	199,896,000	199,896,000
	Aceh Barat Daya		47,560,000	81,031,650	103,201,000
	Gayo Lues		58,929,980	85,734,000	112,152,000
	Aceh Tamiang		52,786,740	92,011,999	120,685,000
	Nagan Raya		64,870,000	98,099,895	116,281,000
	Aceh Jaya		41,920,000	77,699,000	100,016,000
	Kota Banda Aceh	137,950,000	134,470,000	146,816,573	160,363,000
	Kota Sabang	79,870,000	77,760,000	80,258,000	92,661,000
	Kota Langsa		62,640,000	85,993,210	104,780,000
	Kota Lhoksumawe		87,339,996	95,472,970	108,124,000

Sumatera Utara	Nias	207,820,000	230,874,303	155,786,000	172,962,000
	Mandailing Natal	140,420,000	165,890,000	168,144,000	183,020,000
	Tapanuli Selatan	252,890,000	271,621,476	252,889,000	265,560,000
	Tapanuli Tengah	122,530,000	129,090,000	134,817,000	153,475,000
	Tapanuli Utara	210,640,000	227,813,893	139,276,000	149,607,000
	Toba Samosir	141,910,000	156,550,000	159,848,000	108,378,000
	Labuhan Batu	218,440,000	263,300,000	268,127,000	286,548,000
	Asahan	236,080,000	292,739,191	274,447,000	292,231,000

	Simalungun	256,260,000	299,970,000	299,970,000	313,639,000
	Dairi	132,130,000	161,265,720	131,494,000	131,494,000
	Karo	142,470,000	173,460,000	190,230,000	194,397,000
	Deli Serdang	401,010,000	501,049,820	485,416,000	330,429,000
	Langkat	242,790,000	290,714,345	273,583,000	293,755,000
	Humbang Hasundutan		-	71,368,000	83,580,000
	Kota Sibolga	87,950,000	94,313,522	93,121,000	101,569,000
	Kota Tanjung Balai	99,960,000	103,860,000	103,860,000	106,177,000
	Kota Pematang Siantar	129,150,000	145,029,356	140,229,000	149,682,000
	Kota Tebing Tinggi	110,040,000	114,961,000	110,041,000	114,200,000
	Kota Medan	341,030,000	433,041,453	404,989,980	426,570,000
	Kota Binjai	118,420,305	132,050,000	132,050,000	146,640,000
	Kota Padang Sidempuan		107,484,671	110,115,000	128,044,000

Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	99,250,000	102,029,510	99,249,000	110,806,000
	Pesisir Selatan	155,930,000	185,370,000	193,016,000	206,774,000
	Solok	169,170,000	194,501,078	202,064,000	151,940,000
	Sawahlunto/Sijunjung	140,400,000	159,880,000	167,030,000	107,707,000
	Tanah Datar	150,390,000	168,660,000	173,264,000	182,330,000
	Padang Pariaman	177,200,000	171,870,000	195,136,430	197,236,000
	Agam	168,290,000	186,690,000	190,470,000	204,252,000
	Lima Puluh Koto	135,420,000	160,470,000	167,840,000	179,236,000
	Pasaman	175,630,000	203,420,000	212,914,640	115,592,000
	Kota Padang	233,830,000	265,540,000	272,154,000	287,033,000
	Kota Solok	68,950,000	88,360,000	90,622,000	94,643,000
	Kota Sawah Lunto	70,340,000	79,070,000	81,802,000	89,637,000
	Kota Padang Panjang	64,550,000	85,087,691	89,061,939	97,610,000
	Kota Bukittinggi	89,760,000	107,948,511	108,391,000	114,820,000
	Kota Payakumbuh	106,950,000	119,970,000	119,970,000	119,970,000
	Kota Pariaman		30,129,659	70,578,000	95,973,000

Riau	Kuantan Singingi	88,960,000	126,543,794	12,487,790	203,823,000
	Indragiri Hulu	92,920,000	130,660,000	162,264,000	162,264,000
	Indragiri Hilir	203,820,000	185,890,000	205,815,980	203,823,000
	Pelelawan	70,590,000	91,460,000	109,946,960	109,950,000
	Siak	41,390,000	101,292,371	99,117,920	99,020,000
	Kampar	185,110,000	147,420,000	185,108,960	185,110,000
	Rokan Hulu	104,150,000	93,890,000	104,145,960	206,723,000
	Bengkalis	206,720,000	148,630,000	206,700,000	206,723,000
	Rokan Hilir	38,060,000	99,053,470	96,084,592	95,280,000
	Kota Pekanbaru	143,007,500	161,800,000	166,469,340	171,340,000
	Kota Dumai	104,310,800	99,144,228	97,784,340	97,050,000

Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu	260,200,000	314,040,000	327,254,133	134,240,000
	Ogan Komering Ilir	249,690,000	322,947,235	335,451,440	253,712,000
	Muara Enim	193,094,116	177,270,000	179,580,000	187,290,000
	Lahat	144,270,000	186,920,000	193,320,000	206,384,000
	Musi Rawas	135,240,000	166,787,500	187,256,000	187,256,000
	Musi Banyu Asin	249,920,000	136,100,000	145,336,000	145,336,000
	Banyu Asin		112,400,938	176,030,830	218,780,000
	Kota Palembang	292,190,000	342,660,000	343,375,999	351,710,000
	Kota Prabumulih		71,563,842	76,100,000	87,906,000
	Kota Pagar Alam		90,106,924	89,572,640	94,830,000
	Kota Lubuklinggau		84,280,319	96,412,000	107,717,000

Jambi	Kerinci	163,100,000	172,450,000	177,753,000	193,116,000
	Merangin	136,640,000	156,338,367	160,886,245	176,478,000
	Sarolangun	112,110,000	128,630,000	133,096,011	139,530,000
	Batang Hari	120,670,000	140,880,000	140,880,000	145,487,000
	Muaro Jambi	110,660,000	130,849,970	128,068,210	143,794,000
	Tanjung Jabung Timur	97,440,000	104,910,000	113,800,000	130,807,000
	Tanjung Jabung Barat	104,580,000	112,720,000	119,273,000	133,439,000
	Tebo	104,730,000	117,628,110	133,467,204	142,290,000
	Bungo	134,880,000	140,520,000	147,820,000	164,996,000
	Kota Jambi	154,740,000	178,310,000	186,780,000	198,220,000

Bengkulu	Bengkulu Selatan	178,000,000	205,260,000	87,323,000	92,904,000
	Rejang Lebong	173,300,000	209,509,560	212,148,904	118,964,000
	Bengkulu Utara	166,720,000	213,230,000	158,100,000	166,265,000
	Kota Bengkulu	129,370,000	152,268,000	157,916,025	167,650,000

Lampung	Lampung Barat	133,520,000	144,690,000	149,384,000	165,705,000
	Tanggamus		252,630,000	276,650,000	285,091,000
	Lampung Selatan	257,760,000	321,983,469	335,148,173	337,196,000
	Lampung Timur	209,730,000	241,020,000	257,028,000	282,847,000
	Lampung Tengah	272,870,000	296,049,994	308,268,000	331,430,000
	Lampung Utara	200,310,920	215,610,000	215,610,000	225,960,000
	Way Kanan	120,110,000	129,600,000	141,177,000	154,730,000
	Tulangbawang	168,200,000	195,910,000	203,812,000	224,120,000
	Kota Bandar Lampung	14,255,412	233,550,000	243,044,000	264,715,000
	Kota Metro	111,460,000	124,513,688	122,427,811	181,350,675

Bangka Belitung	Bangka	165,570,000	181,389,996	80,420,500	95,112,000
	Belitung	101,370,000	116,720,000	78,190,000	88,920,000
	Bangka Barat		-	42,217,000	55,370,000
	Bangka Tengah		-	33,853,000	50,454,000
	Belitung Timur		-	45,810,000	63,902,000
	Kota Pangkal Pinang	81,310,000	90,850,000	95,875,500	108,718,000

Kepulauan Riau	Karimun	52,880,000	87,720,000	117,649,000	120,000,000
	Kepulauan Riau	95,510,000	81,675,000	96,596,646	85,225,000
	Natuna	69,030,000	96,600,000	147,892,140	147,584,000
	Kota Batam	96,212,000	104,200,777	104,201,000	125,000,000
	Kota Tanjung Pinang		57,369,895	59,818,000	100,320,000



LAMPIRAN 2

RINGKASAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA
TAHUN ANGGARAN

2002-2005

(000 Rupiah)

Provinsi	Kabupaten/Kota	2002	2003	2004	2005
Nangroe Aceh Darussalam	Simeule	5,620,000	11,601,441	15,535,402	15,373,622
	Aceh Singkil	5,951,604	8,230,292	5,500,000	4,986,905
	Aceh Selatan	2,356,139	6,904,488	3,680,000	5,021,950
	Aceh Tenggara	3,936,717	5,016,250	4,366,310	5,793,680
	Aceh Timur	9,462,035	8,705,044	9,856,066	5,804,270
	Aceh Tengah	5,063,895	6,944,749	6,967,326	5,363,500
	Aceh Barat	5,069,214	7,862,783	7,535,717	7,099,477
	Aceh Besar	4,134,200	5,682,500	7,269,600	7,534,242
	Pidie	2,265,171	5,587,340	8,629,566	9,008,087
	Bireuen	2,664,000	3,390,770	4,226,100	7,677,000
	Aceh Utara	10,507,961	37,774,710	29,728,192	29,626,570
	Aceh Barat Daya		626,150	2,717,470	4,000,640
	Gayo Lues		831,390	1,191,573	1,085,437
	Aceh Tamiang		757,980	4,075,680	7,802,070
	Nagan Raya		923,954	3,053,759	2,862,314
	Aceh Jaya		6,930,089	9,559,150	10,707,526
	Kota Banda Aceh	6,008,136	4,020,581	9,457,199	5,143,500
	Kota Sabang	2,726,256	6,389,508	5,449,013	5,980,772
	Kota Langsa		3,835,748	2,395,890	4,626,850
	Kota Lhoksumawe		9,686,370	9,414,452	9,711,919

Sumatera Utara	Nias	5,519,809	10,929,945	7,508,360	6,698,432
	Mandailing Natal	5,889,500	6,551,823	8,879,000	5,801,500
	Tapanuli Selatan	6,690,949	7,879,346	7,115,024	8,367,546
	Tapanuli Tengah	3,896,364	5,433,747	6,817,910	5,697,235
	Tapanuli Utara	7,600,379	11,252,649	5,981,192	6,954,793
	Toba Samosir	10,867,825	12,164,909	4,403,781	8,617,024
	Labuhan Batu	10,640,585	25,630,556	27,500,447	25,454,818

	Asahan	24,078,223	22,626,588	22,876,082	23,100,000
	Simalungun	7,012,213	17,493,101	14,577,545	18,822,379
	Dairi	3,806,299	4,742,508	17,609,764	4,354,230
	Karo	6,195,713	9,310,352	9,151,943	12,750,000
	Deli Serdang	34,077,313	51,910,663	46,169,042	59,145,801
	Langkat	11,909,571	14,831,910	9,669,768	16,834,743
	Humbang Hasmdutan		-	2,758,546	3,087,312
	Kota Sibolga	2,828,110	7,135,535	5,194,049	6,057,446
	Kota Tanjung Balai	6,622,088	9,933,585	8,840,190	9,574,573
	Kota Pematang Siantar	11,010,743	11,563,236	13,483,466	14,923,315
	Kota Tebing Tinggi	4,198,885	6,263,263	9,701,883	6,851,238
	Kota Medan	129,103,734	233,786,690	257,989,893	282,228,792
	Kota Binjai	4,974,913	8,312,932	10,571,425	13,002,786
	Kota Padang Sidempuan		3,483,637	5,236,214	4,682,000

Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	3,588,982	9,112,120	12,144,157	13,890,844
	Pesisir Selatan	5,172,733	9,680,364	7,346,071	8,973,797
	Solok	6,444,500	12,355,964	10,448,412	10,785,336
	Sawahlunto/Sijunjung	7,261,231	19,949,324	14,352,310	10,439,959
	Tanah Datar	3,732,300	11,931,505	15,390,490	17,422,476
	Padang Pariaman	6,085,708	11,029,355	15,840,390	10,270,200
	Agam	4,593,656	11,718,358	11,676,619	13,101,148
	Lima Puluh Koto	3,144,950	12,760,283	10,146,663	11,114,888
	Pasaman	7,315,456	16,504,015	9,077,570	8,391,409
	Kota Padang	54,083,435	63,932,547	68,646,560	105,410,798
	Kota Solok	2,148,947	7,262,073	8,546,776	4,810,899
	Kota Sawah Lunto	3,377,536	8,434,992	9,860,369	13,201,655
	Kota Padang Panjang	2,422,659	6,708,002	8,334,177	7,047,488
	Kota Bukittinggi	10,040,602	15,279,874	18,062,526	27,613,031
	Kota Payahkumbuh	8,358,736	13,715,902	20,121,313	21,875,411
	Kota Pariaman		1,217,375	2,849,910	3,229,500

Riau	Kuantan Singingi	4,500,000	5,752,466	9,109,080	20,610,300
	Indragiri Hulu	3,799,116	5,337,480	5,528,916	11,273,980
	Indragiri Hilir	17,554,688	21,303,477	19,013,933	20,610,300
	Pelelawan	5,170,000	9,187,910	8,915,960	10,172,940
	Siak	19,410,000	68,410,489	60,749,940	110,369,500
	Kampar	14,989,203	31,505,419	26,792,892	26,265,942
	Rokan Hulu	4,519,264	8,600,880	19,064,720	24,140,500
	Bengkalis	24,150,462	38,884,556	39,612,367	37,386,078
	Rokan Hilir	12,030,000	33,075,580	28,090,488	33,247,435
	Kota Pekanbaru	37,785,105	58,701,849	71,907,180	87,000,000
	Kota Dumai	8,580,000	11,590,603	16,155,423	20,363,410

Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu	8,312,547	16,853,725	17,151,785	10,238,243
	Ogan Komering Ilir	10,734,441	13,824,127	12,848,840	10,212,090
	Muara Enim	16,512,278	27,078,417	27,059,124	34,819,448
	Lahat	7,363,575	10,138,490	14,325,900	19,865,436
	Musi Rawas	8,687,611	13,133,824	11,893,926	11,938,339
	Musi Banyu Asin	11,095,139	23,880,870	9,491,426	11,523,500
	Banyu Asin		3,024,035	5,040,000	6,124,870
	Kota Palembang	36,037,251	57,496,301	61,586,178	92,504,030
	Kota Prabumulih		8,523,579	6,787,987	6,639,591
	Kota Pagar Alam		4,027,619	3,849,211	4,492,825
	Kota Lubuklinggau		11,432,283	7,374,694	15,000,000

Jambi	Kerinci	5,699,601	8,566,441	9,187,168	14,531,548
	Merangin	5,105,920	11,101,307	11,367,503	11,459,322
	Sarolangun	6,410,115	5,307,785	7,343,064	7,022,700
	Batang Hari	7,954,609	11,334,253	18,269,268	16,449,244
	Muaro Jambi	8,330,000	10,782,483	7,418,050	10,073,400
	Tanjung Jabung Timur	3,210,000	7,422,500	8,088,115	8,640,050
	Tanjung Jabung Barat	7,203,689	11,573,349	17,469,244	15,037,123
	Tebo	6,380,234	18,543,121	11,169,745	12,574,793
	Bungo	13,028,269	28,021,236	20,821,712	17,629,845
	Kota Jambi	17,449,008	23,436,357	32,133,200	28,358,300

Bengkulu	Bengkulu Selatan	8,826,602	4,595,164	4,106,788	5,165,822
	Rejang Lebong	6,036,845	7,535,240	7,748,221	10,665,201
	Bengkulu Utara	5,130,000	8,820,167	8,341,047	5,892,999
	Kota Bengkulu	5,186,070	9,904,640	15,163,932	16,979,850

Lampung	Lampung Barat	1,789,093	5,394,418	4,954,463	4,682,728
	Tanggamus		7,607,215	7,000,000	10,000,000
	Lampung Selatan	8,754,244	11,928,096	13,265,861	16,173,140
	Lampung Timur	3,450,502	6,892,305	7,291,964	10,000,000
	Lampung Tengah	6,556,573	10,125,006	10,197,328	10,943,956
	Lampung Utara	6,090,880	7,577,277	8,402,191	8,519,001
	Way Kanan	834,353	3,880,548	2,309,951	2,417,115
	Tulanghawang	3,203,491	6,862,727	5,173,970	5,118,000
	Kota Bandar Lampung	30,158,227	35,511,796	36,689,574	46,195,215
	Kota Metro	4,529,174	10,098,045	10,511,497	11,256,804

Bangka Belitung	Bangka	16,856,410	31,953,993	20,136,343	16,981,232
	Belitung	16,191,987	22,005,775	19,541,529	17,155,099
	Bangka Barat		-	9,624,100	10,075,229
	Bangka Tengah		-	13,147,578	9,983,500
	Belitung Timur		-	10,405,998	12,116,001
	Kota Pangkal Pinang	8,087,252	10,065,797	13,432,973	11,078,295

Kepulauan Riau	Karimun	86,200,000	25,917,640	28,274,956	27,522,500
	Kepulauan Riau	58,885,000	54,773,558	62,281,967	59,631,000
	Natuna	5,170,000	3,001,000	2,517,710	2,900,000
	Kota Batam	47,655,000	56,379,183	63,335,003	63,713,000
	Kota Tanjung Pinang		11,598,975	16,941,803	28,633,000



LAMPIRAN 3

RINGKASAN REALISASI BELANJA DAERAH (BD)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA

TAHUN ANGGARAN

2002-2005

(000 Rupiah)

Provinsi	Kabupaten/Kota	2002	2003	2004	2005
Nanggroe Aceh Darussalam	Simeule	189,320,000	162,253,213	154,865,122	183,014,258
	Aceh Singkil	131,420,364	149,243,366	183,301,559	198,452,812
	Aceh Selatan	151,594,843	205,208,870	233,491,560	244,010,520
	Aceh Tenggara	143,003,132	181,220,610	195,833,670	216,548,540
	Aceh Timur	357,875,853	282,870,904	255,335,460	276,356,200
	Aceh Tengah	216,929,511	288,337,529	259,336,248	192,455,320
	Aceh Barat	289,959,486	187,402,466	226,487,391	256,434,440
	Aceh Besar	231,850,061	290,883,524	299,576,396	294,608,387
	Pidie	200,454,063	381,390,630	406,505,373	408,164,648
	Bireuen	192,192,605	267,227,964	312,214,540	325,424,810
	Aceh Utara	190,690,469	1,239,467,920	1,205,652,078	967,192,340
	Aceh Barat Daya		106,034,060	139,944,120	177,435,520
	Gayo Lues		121,484,350	142,776,431	201,608,387
	Aceh Tamiang		133,086,950	184,058,912	241,365,630
	Nagan Raya		119,088,347	162,996,647	191,883,453
	Aceh Jaya		102,576,488	132,853,540	179,246,616
	Kota Banda Aceh	209,356,438	251,116,771	227,424,895	256,678,620
	Kota Sabang	128,854,206	158,663,705	135,095,725	149,851,821
	Kota Langsa		111,846,270	172,509,970	195,766,120
	Kota Lhoksumawe		224,127,547	252,431,971	241,143,794

Sumatera Utara	Nias	272,739,900	286,393,514	228,367,469	259,226,276
	Mandailing Natal	189,624,107	234,242,997	229,102,453	238,228,355
	Tapanuli Selatan	299,597,417	342,734,512	345,731,937	379,270,692
	Tapanuli Tengah	161,254,126	208,412,797	227,246,388	240,225,906
	Tapanuli Utara	256,771,617	317,202,837	212,565,950	253,384,132
	Toba Samosir	187,736,333	235,449,882	215,346,403	171,238,810
	Labuhan Batu	278,091,926	412,440,197	402,780,548	434,562,285

	Asahan	326,154,802	387,840,595	383,833,892	410,954,520
	Simalungun	367,084,038	463,088,584	413,431,824	414,348,873
	Dairi	167,177,171	217,284,439		
	Karo	181,000,000	243,513,158	243,492,836	253,499,414
	Deli Serdang	520,777,005	655,545,793	665,753,125	527,616,800
	Langkat	327,160,145	406,192,906	455,649,320	454,215,951
	Humbang Hasundutan		-	106,159,585	123,321,460
	Kota Sibolga	106,126,776	139,786,496	142,832,981	159,545,937
	Kota Tanjung Balai	162,827,106	171,938,594	177,207,082	178,769,493
	Kota Pematang Siantar	165,943,997	192,839,470	211,748,467	223,768,642
	Kota Tebing Tinggi	134,677,762	161,702,368	188,939,148	166,781,114
	Kota Medan	663,506,523	1,168,266,864	1,118,138,878	1,156,210,071
	Kota Binjai	155,047,170	186,247,819	191,366,509	198,845,661
	Kota Padang Sidempuan		138,987,840	170,725,074	177,039,116

Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	142,421,337	176,070,500	196,256,553	215,871,152
	Pesisir Selatan	185,355,579	255,971,291	280,585,136	285,728,723
	Solok	227,909,931	293,374,512	307,240,197	219,356,528
	Sawahlunto/Sijunjung	204,528,606	327,665,678	268,970,416	194,199,493
	Tanah Datar	204,743,585	265,097,274	246,449,961	265,203,543
	Padang Pariaman	207,658,835	248,839,889	259,691,790	283,081,710
	Agam	225,801,877	276,075,335	281,833,620	291,426,504
	Lima Puluh Koto	169,756,953	218,079,068	265,788,655	257,351,209
	Pasaman	220,853,835	306,595,952	308,972,520	183,707,744
	Kota Padang	346,762,372	399,857,769	448,173,170	500,671,998
	Kota Solok	85,330,117	137,706,418	132,702,414	148,644,442
	Kota Sawah Lunto	86,875,852	108,574,003	133,702,414	143,738,642
	Kota Padang Panjang	75,504,120	127,274,310	148,839,166	163,421,823
	Kota Bukittinggi	113,642,230	162,109,371	182,192,757	179,895,752
	Kota Payakumbuh	128,483,114	181,954,502	192,308,934	199,502,327
	Kota Pariaman		50,297,112	99,034,630	136,185,560

Riau	Kuantan Singingi	298,060,000	310,092,496	390,089,460	488,799,217
	Indragiri Hulu	316,552,370	394,262,890	408,345,165	428,675,590
	Indragiri Hilir	397,063,852	421,005,558	476,624,008	488,799,210
	Pelelawan	332,580,000	307,282,679	475,859,960	486,902,920
	Siak	823,150,000	945,100,288	1,030,328,834	1,103,197,299
	Kampar	577,178,005	814,137,464	817,577,437	703,652,984
	Rokan Hulu	279,604,725	270,987,445	382,312,200	1,553,930,904
	Bengkalis	1,433,679,948	1,476,146,814	1,333,955,880	1,298,396,361
	Rokan Hilir	661,290,000	949,509,627	993,069,528	1,193,399,423
	Kota Pekanbaru	364,020,424	502,142,438	631,850,598	554,137,404
	Kota Dumai	258,900,000	316,777,175	355,588,038	369,593,600

Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu	355,833,019	440,987,850	458,277,638	250,740,209
	Ogan Komering Ilir	343,507,197	410,141,953	457,666,880	345,463,710
	Muara Enim	362,518,660	393,877,755	389,356,812	485,447,883
	Lahat	230,129,381	303,585,772	335,613,627	419,863,835
	Musi Rawas	312,078,364	357,599,263	394,261,861	393,747,974
	Musi Banyu Asin	575,097,590	507,979,140	61,370,470	622,897,442
	Banyu Asin		192,121,428	287,837,640	381,423,690
	Kota Palembang	453,648,766	529,222,512	611,571,951	689,091,510
	Kota Prabumulih		158,130,129	187,623,391	201,877,336
	Kota Pagar Alam		168,342,045	168,356,766	189,902,926
	Kota Lubuklinggau		174,391,976	210,432,716	240,395,336

Jambi	Kerinci	199,292,750	248,411,443	248,581,726	271,505,757
	Merangin	165,851,972	218,871,360	220,283,805	239,253,940
	Sarolangun	161,132,224	194,046,685	229,654,776	254,391,866
	Batang Hari	169,079,311	210,517,816	262,961,284	268,156,269
	Muaro Jambi	139,700,000	202,541,459	235,500,140	237,070,930
	Tanjung Jabung Timur	138,455,368	188,548,666	249,957,132	281,508,423
	Tanjung Jabung Barat	143,930,231	210,437,529	258,200,026	261,271,356
	Tebo	143,148,272	204,459,061	215,807,152	221,227,505
	Bungo	184,636,468	249,345,277	256,838,430	262,844,948
	Kota Jambi	194,757,864	284,509,925	330,622,570	301,668,710

Bengkulu	Bengkulu Selatan	217,478,916	263,354,113	124,523,535	133,997,138
	Rejang Lebong	200,381,658	257,497,202	266,980,002	167,696,493
	Bengkulu Utara	192,122,196	287,516,274	253,267,615	225,619,999
	Kota Bengkulu	146,214,402	220,191,709	215,758,971	216,188,689

Lampung	Lampung Barat		226,777,326	231,450,552	248,722,298
	Tanggamus	293,755,925	327,132,696	352,066,141	383,909,882
	Lampung Selatan	309,537,038	409,780,767	425,066,141	482,759,984
	Lampung Timur	250,029,942	369,876,150	388,907,593	409,515,057
	Lampung Tengah	318,535,462	428,521,770	426,402,786	491,379,716
	Lampung Utara	239,321,977	298,859,206	290,702,076	304,023,038
	Way Kanan	155,740,313	206,284,782	220,874,795	217,814,227
	Tulangbawang	201,922,867	286,416,339	305,930,159	312,180,135
	Kota Bandar Lampung	279,253,892	369,344,394	378,932,222	412,195,895
	Kota Metro	138,810,088	207,354,953	202,654,443	121,947,000

Bangka Belitung	Bangka	244,583,079	331,893,054	189,166,596	184,865,670
	Belitung	150,184,522	231,214,031	141,764,899	233,009,750
	Bangka Barat		-	78,271,380	110,065,587
	Bangka Tengah		-	80,155,491	113,497,960
	Belitung Timur		-	84,698,279	123,909,455
	Kota Pangkal Pinang	113,221,980	166,702,942	192,183,706	166,355,482

Kepulauan Riau	Karimun	356,810,000	340,920,302	252,497,968	213,102,284
	Kepulauan Riau	382,695,000	425,491,344	366,489,389	276,702,161
	Natuna	332,580,000	390,000,000	415,065,690	369,277,770
	Kota Batam	358,633,723	422,531,025	369,082,440	337,757,688
	Kota Tanjung Pinang		242,478,117	196,523,750	189,154,430



LAMPIRAN 4
ANALISIS REGRESI SEDERHANA
PENGARUH PAD_t DAN DAU_t TERHADAP BD_t

Dependent Variable: BD
 Method: Least Squares
 Date: 04/17/07 Time: 09:07
 Sample: 1 492
 Included observations: 434
 Excluded observations: 58

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.99E+08	10726732	27.89375	0.0000
PAD	0.187650	0.075238	2.494103	0.0130
R-squared	0.014195	Mean dependent var		3.04E+08
Adjusted R-squared	0.011913	S.D. dependent var		2.22E+08
S.E. of regression	2.21E+08	Akaike info criterion		41.26583
Sum squared resid	2.10E+19	Schwarz criterion		41.28460
Log likelihood	-8952.685	F-statistic		6.220549
Durbin-Watson stat	1.278468	Prob(F-statistic)		0.013000

Dependent Variable: BD
 Method: Least Squares
 Date: 04/17/07 Time: 09:07
 Sample: 1 492
 Included observations: 434
 Excluded observations: 58

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	99549663	21659985	4.596017	0.0000
DAU	1.310655	0.125021	10.48349	0.0000
R-squared	0.202810	Mean dependent var		3.04E+08
Adjusted R-squared	0.200965	S.D. dependent var		2.22E+08
S.E. of regression	1.98E+08	Akaike info criterion		41.05346
Sum squared resid	1.70E+19	Schwarz criterion		41.07223
Log likelihood	-8906.601	F-statistic		109.9036
Durbin-Watson stat	1.024963	Prob(F-statistic)		0.000000

LAMPIRAN 5

ANALISIS REGRESI SEDERHANA

PENGARUH PAD_{t-1} DAN DAU_{t-1} TERHADAP BD_t

Dependent Variable: BDT

Method: Least Squares

Date: 04/17/07 Time: 14:35

Sample(adjusted): 1 369

Included observations: 321

Excluded observations: 48 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	78370087	22248978	3.522413	0.0005
DAU ₁	1.570868	0.124248	12.64297	0.0000
R-squared	0.333813	Mean dependent var		3.26E+08
Adjusted R-squared	0.331725	S.D. dependent var		2.32E+08
S.E. of regression	1.90E+08	Akaike info criterion		40.96634
Sum squared resid	1.15E+19	Schwarz criterion		40.98983
Log likelihood	-6573.097	F-statistic		159.8447
Durbin-Watson stat	0.902567	Prob(F-statistic)		0.000000

Dependent Variable: BDT

Method: Least Squares

Date: 04/17/07 Time: 14:35

Sample(adjusted): 1 369

Included observations: 321

Excluded observations: 48 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.49E+08	13081083	19.01169	0.0000
PAD ₁	5.083271	0.462086	11.00070	0.0000
R-squared	0.275025	Mean dependent var		3.26E+08
Adjusted R-squared	0.272753	S.D. dependent var		2.32E+08
S.E. of regression	1.98E+08	Akaike info criterion		41.05090
Sum squared resid	1.25E+19	Schwarz criterion		41.07440
Log likelihood	-6586.670	F-statistic		121.0153
Durbin-Watson stat	1.005850	Prob(F-statistic)		0.000000

MPIRAN 6

ANALISIS REGRESI BERGANDA

PENGARUH PAD, DAN DAU, TERHADAP BD,

Dependent Variable: BD

Method: Least Squares

Date: 04/17/07 Time: 14:37

Sample: 1 492

Included observations: 434

Excluded observations: 58

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	99095449	21579328	4.592147	0.0000
DAU	1.292984	0.124841	10.35702	0.0000
PAD	0.139779	0.067561	2.068925	0.0391
R-squared	0.210650	Mean dependent var		3.04E+08
Adjusted R-squared	0.206987	S.D. dependent var		2.22E+08
S.E. of regression	1.98E+08	Akaike info criterion		41.04819
Sum squared resid	1.68E+19	Schwarz criterion		41.07634
Log likelihood	-8904.457	F-statistic		57.50932
Durbin-Watson stat	1.032425	Prob(F-statistic)		0.000000

LAMPIRAN 7

ANALISIS REGRESI BERGANDA

PENGARUH PAD_{t-1} DAN DAU_{t-1} TERHADAP BD_t

Dependent Variable: BDT

Method: Least Squares

Date: 04/17/07 Time: 14:36

Sample(adjusted): 1 369

Included observations: 321

Excluded observations: 48 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	81852447	20307208	4.030709	0.0001
DAUT_1	1.211456	0.121816	9.944925	0.0000
PADT_1	3.503879	0.434285	8.068156	0.0000
R-squared	0.447011	Mean dependent var		3.26E+08
Adjusted R-squared	0.443533	S.D. dependent var		2.32E+08
S.E. of regression	1.73E+08	Akaike info criterion		40.78633
Sum squared resid	9.53E+18	Schwarz criterion		40.82158
Log likelihood	-6543.207	F-statistic		128.5283
Durbin-Watson stat	0.862516	Prob(F-statistic)		0.000000